PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DESA

Rhesca Anugrah Amulia

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

rhescanugrahamulia@gmail.com

ABSTRAK

Pokok permasalahan pada penelitian ini membahas tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa dengan melihat partisipasi masyarakat dan melihat peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa. Partisipasi masyarakat di Desa Manurung dalam mengikuti pelaksanaan rapat

Musrembang di Desa masih kurang aktif dan masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan disetiap tahunnya. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam mengikuti pelaksanaan Musrembang kedepannya adalah dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan, menggerakkan partisipasi melalui lembaga yang dikenal oleh masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan dan mengajak masyarakat untuk bergotong royong.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Musrembang Desa

PENDAHULUAN

Pada umumnya masyarakat menginginkan kehidupan yang ideal dan lebih baik setiap harinya. Kondisi tersebut dapat menggambarkan segala kebutuhan masyarakat terpenuhi. Suatu kondisi yang tidak dikhawatirkan untuk memikirkan hari esok. Kondisi yang memberikan situasi kondusif guna aktualisasi diri dan untuk terwujudnya proses relasi sosial yang berkeadilan. Realitas yang dianggap sebagai masalah sosial selalu mendorong atau memberi inspirasi bagi munculnya usaha perubahan ataupun perbaikan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sebuah desa. (Sebagai et al., 2015)

Partispasi masyarakat merupakan suatu proses yang dapat mendukung masyarakat untuk mulai “sadar” akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis). Sumardi (2010:46), mengemukakan bahwa partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. (Sulaeman et al., 2019)

Kesesuaian hasil observasi dengan konsep teori good governance ini merupakan implementasi dari terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dan selanjutnya Conyers (1991: 154-155) mengemukakan bahwa adanya tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah mempunyai sifat yang sangat penting. Pertama, bahwa partisipasi masyarakat merupakan alat guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat. Kedua, bahwa masyarakat akan mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa terlibat di dalam proses atau program pembangunan, kepercayaan semacam ini adalah penting apabila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat setempat. Ketiga, bahwa alasan yang mendorong adanya partisipasi umum diberbagai negara karena timbul asumsi bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat terlibat dalam pembangunan. (Pidarta, 2009) (Sulaeman et al., 2019)

Berkaitan dengan perencanaan dalam pembangunan desa, peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam membuat suatu perencanaan kegiatan pembangunan apa yang akan dilakukan mengingat hanya masyarakat setempat yang lebih mengetahui berbagai macam permasalahan dan potensi sumber daya yang ada sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat setempat. (Sebagai et al., 2015)

Keterlibatan langsung masyarakat secara aktif dalam perencanaan dapat memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif pembangunan yang bersumber dari masyarakat. Dengan penerapan perencanaan partisipatif ini kemungkinan dapat membuka cakrawala pikiran masyarakat/pelaku pembangunan desa untuk menemukan masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki sehingga akan tumbuh kemampuan dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi desa serta mendokumentasikan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa. (Sebagai et al., 2015)

KAJIAN PUSTAKA

1. KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT

Konsep partisipasi, dalam perkembangannya, memiliki pengertian yang beragam walaupun dalam beberapa hal memiliki persamaan. Dalam konsep pembangunan, pendekatan partisipasi paling tidak memiliki tiga makna. Pertama, partisipasi dimaknai sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan dalam mempromosikan proses demokratisasi dan pemberdayaan. Kedua, pendekatan ini dikenal sebagai partisipasi dalam dikotomi instrumen dan tujuan. Konsep ketiga, partisipasi dimaknai sebagai sebuah situasi dimana pejabat lokal, tokoh masyarakat, LSM, birokrasi dan aktor-aktor lain yang terlibat langsung dengan program partisipatif, melakukan praktik yang jauh dari prinsip partisipasi. (Mustanir & Abadi, 2017)

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama, menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama. Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan pengolahan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Kemudian masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan berkerja cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan. Dapat di simpulkan masyarakat itu adalah suatu system, kesatuan manusia yang memiliki suatu interaksi, kebiasaan (adat-istiadat), tata cara hidup bersama yang hidup dengan batasan-batasan (aturan-aturan) dan menganggap diri mereka suatu kesatuan sosial yang bersifat kontinyu dan terikat. (Mustanir & Abadi, 2017)

Partisipasi sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (sebagai salah satu tujuan SPPN Pasal 2 ayat 4 huruf d) memaknai “partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan” Dari pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi social, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat.(Mustanir & Yasin, 2018)

Menurut Isbandi dalam (Mustanir, Abadi, and Nasri 2016) (Latif et al. 2019) bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.(Mustanir et al., 2020)

Indikator Partisipasi Masyarakat menurut Mubyarto adalah:

- a) Terlibat memikul tanggung jawab pelaksanaan pembangunan
- b) Musyawarah perencanaan pembangunan
- c) Pelaksana hasil perencanaan pembangunan
- d) Kesiadaan membayar iuran sebagai dana swadaya
- e) Kesiadaan masyarakat dalam menyumbang material seperti pasir, batu bata, semen.(Mustanir & Darmiah, 2016)

2. KONSEP MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSREMBANG)

Perencanaan pembangunan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Arthur W. Lewis (2005).(Mustanir & Rusdi, 2019)

Pengertian perencanaan pembangunan dilihat dari unsur yang membentuknya yaitu perencanaan dan pembangunan. Maisah (2010: 7) mengungkapkan bahwasanya sebuah teori perencanaan yang ideal adalah yang mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan

masyarakat serta mampu memadukan berbagai kepentingan yang ada. Perencanaan menurut (Riyadi dan Bratakusumah 2005: 4; Yılmaz Bakır, Doğan, Koçak Güngör, & Bostancı, 2018; Weber, Crum, & Salinas, 2015; Stanton, n.d.; Sankalia, 2018) adalah memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, berhubungan dengan masa depan, bertujuan mencapai tujuan, alokasi sumber daya, serta kegiatan terus menerus.(Mustanir et al., 2019)

Musrenbang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (top down planning)(A. Mustanir 2018b) (A. Mustanir 2017).(Mustanir et al., 2018)

Musrenbang diselenggarakan untuk mensinkronkan berbagai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari forum musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya sehingga menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dilaksanakan di Desa atau dibahas kembali ke tingkat Kecamatan (Irwan et al. 2019) (A. Mustanir 2018a) (Latif et al. 2019)(Mustanir et al., 2018)

Gotong-royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya. Secara garis besar musyawarah rencana pembangunan mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
- 2) Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketenteraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan kelurahan.
- 3) Perencanaan yang dilaksanakan berdasar pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat sendiri.
- 4) Terwujud peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Imron, Ali. 2008). Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang. Musrenbang dapat digunakan sebagai proses bernegosiasi, berekonsiliasi dan berharmonisasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsesus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan.(No et al., 2019)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimana penulis mencoba untuk meneliti atau menganalisa dengan mencoba memberikan gambaran dan penjelasan mengenai kenyataan empiris yang dijadikan objek penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi. (Sebagai et al., 2015)

PEMBAHASAN

Menurut Adisasmita (2006) menyatakan, “Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan”. (Ibrahim et al., 2020)

Menurut Sastropetro dalam Samad (2017 : 284) Beberapa bentuk partisipasi meliputi :

1. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
2. Partisipasi dalam bentuk dana adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
3. Partisipasi dalam bentuk informasi. Partisipasi pemberian informasi merupakan transisi antara tidak ada partisipasi dengan penghargaan. Pemberian informasi mengenai hak- hak, tanggung jawab, dan pilihan- pilihan masyarakat adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat. (Ibrahim et al., 2020)

Musrembang lazimnya dilaksanakan setelah selesainya „tahap persiapan“ penyusunan rencana (analisis situasi dan rancangan rencana) dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif. Musrembang desa bertujuan menstrukturkan permasalahan, mencapai kesepakatan prioritas isu dan permasalahan desa, serta mekanisme penanganannya. Musrembang desa merupakan wahana untuk mensinkronisasikan dan merekonsiliasikan pendekatan “top-down” dengan “bottom- up”, pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (community need assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical assessment);

resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah desa dan non government stakeholders untuk pembangunan desa, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.(Sebagai et al., 2015)

Sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan musrembang desa adalah kelengkapan dan kualitas informasi yang disampaikan kepada peserta, terutama tentang kejelasan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi desa untuk saat ini, prioritas program, kegiatan dan ketersediaan pendanaan; adanya instrumen (format, checklist dsb) yang memudahkan peserta untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan; kesesuaian pembahagian diskusi kelompok dengan pembahagian fungsi pemerintahan desa, tematik isu strategis yang dihadapi; ketersediaan fasilitator yang independen dan kompeten untuk memandu jalannya diskusi untuk mencapai kesepakatan; kualitas demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; dan narasumber harus menguasai materi yang disampaikan.(Sebagai et al., 2015)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat di Desa dalam mengikuti pelaksanaan rapat Musrembang di Desa Manurung masih kurang aktif dan masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan disetiap tahunnya. Hal yang menjadi kendala sehingga masih banyak masyarakat yang kurang aktif dalam mengikuti pelaksanaan musrembang adalah kurang dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan program-program pembangunan di desa sehingga menyebabkan kurang terjalin hubungan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah setempat dalam melaksanakan pembangunan di desa. Selain itu, hal mendasar lainnya mengenai permasalahan komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat dengan banyaknya masyarakat yang tidak tahu tentang adanya pelaksanaan musrembang karena tidak mendapat undangan maupun panggilan dari panitia penyelenggara musrembang yakni pemerintah desa. Hal lain yang mejadi permasalahan adalah kurang terlibatnya seluruh lapisan aspek masyarakat dengan pemerintah Desa dalam merumuskan suatu program pembangunan desa dalam musrembang

2. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam mengikuti pelaksanaan Musrembang ke depannya adalah dengan cara:

- a). Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan.
- b). Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan,
- c). Menggerakkan partisipasi melalui lembaga yang dikenal oleh masyarakat.
- d). Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan.
- e). Mengajak masyarakat untuk bergotong royong. Hal tersebut sangat perlu dilakukan oleh pemerintah Desa mengingat akan pentingnya pembangunan yang baik. Hal tersebut dapat terwujud apabila masyarakat dan pemerintah bekerja sama dan memberikan ruang kepada masyarakat seutuhnya terlibat langsung dalam program pembangunan yang dilaksanakan di Desa .(Sebagai et al., 2015)

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, M., Mustanir, A., Astinah Adnan, A., & Alizah P, N. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Movere Journal*, 2(2), 56–62. <https://doi.org/10.53654/mv.v2i2.118>
- Mustanir, A., & Abadi, P. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/636>
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>
- Mustanir, A., Fitriani, S., Adri, K., Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang (The Synergy of Village Government's Role and Community Participation in the Process of Development Planning in Sidenreng Rappang District). *Journal of Government Science (GovSci)*, 2020(2), 84–108.
- Mustanir, A., Kamarudding, S., Akhwan, A., Madaling, & Mutmainna. (2018). Peranan Aparatur Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Clean Government*, 2(Desember), 67–84. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>
- Mustanir, A., Latif, A., & Irwan, I. (2019). Analisis Kepemimpinan Terhadap Optimalisasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan Di Enrekang. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik (JAKPP)*, 5(2), 1–20. <https://doi.org/10.20956/xxxxxx>
- Mustanir, A., & Rusdi, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) Sebagai Sarana Dakwah Muhammadiyah Pada Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Prosiding*

Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA), 467–475. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-8>

Mustanir, A., & Yasin, A. (2018). *Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. 8(2), 21–31.

No, I., Endayani, H., Satul, A., Abdul, I., Suratno, Belajar, H., Siswa, P., Negeri, S. D. M. P., Madiun, K., Contoh, B., Issa, J., Tabares, I., Objek, P. B. B., Hasil, L., Informasi, T., Aradea, Ade Yuliana, H. H., Pattiserlihun, A., Setiawan, A., Trihandaru, S., ... García Reyes, L. E. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.

PENINGGALAN SEJARAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH DALAM PENANAMAN NILAI-NILA KEBANGSAAN PENDAHULUAN Banyuwangi Merupakan Wilayah Yang Memiliki Beberapa Daerah Yang Berpotensi Memiliki Situs Peninggalan Sejarah Yang Sampai Saat Ini Masih Ada Namun Kondisi, 1(1), 41–57. http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های نوین&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chckhashk=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component%0Ahttp://www.albayan.ae%0Ahttps://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&q=APLIKASI+PENGENA

Sebagai, D., Satu, S., Untuk, S., Sarjana, G., Politik, I., & Ushuluddin, P. F. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Tahun 2014 Baso Frianto Wibowo Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin , Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (Ui*.

Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 7(3), 88–92. <https://doi.org/10.51817/prj.v7i3.374>